WALHI
SULAWESI TENGAH

YAYASAN TIFA

Ruang Hidup yang Ditundukkan

Ancaman Industri Nikel, Kuasa Modal,
dan Masa Depan Wilayah Kelola Rakyat
di Kecamatan Siniu

Penyusun:
Resty Rifdayanti
Fandy Ahmad Eyato
Wandi
Wiwin Matindas



WALHI Sulawesi Tengah
2026

WALHI SULAWESI TENGAH

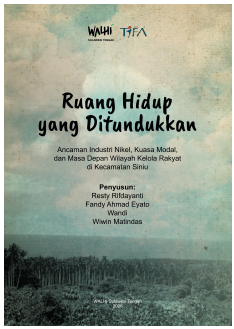
YAYASAN TIFA

Ruang Hidup yang Ditundukkan

Ancaman Industri Nikel, Kuasa Modal,
dan Masa Depan Wilayah Kelola Rakyat
di Kecamatan Siniu

Penyusun:
Resty Rifdayanti
Fandy Ahmad Eyato
Wandi
Wiwin Matindas

WALHI Sulawesi Tengah
2026



Daftar Isi

Bab I **Pendahuluan 1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Penelitian 3
1.3 Pertanyaan Penelitian 4
1.4 Lokasi Penelitian 4

Bab II **Kerangka Konseptual dan Metodologi 5**
2.1 Perspektif Wilayah Kelola Rakyat 5
2.2 Industri Nikel, Hilirisasi, dan Perubahan Ruang Hidup 6
2.3 Relasi Kuasa dan Potensi Penundukan Ruang Hidup 7
2.4 Metodologi Penelitian 8
2.5 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 9
2.6 Keterbatasan Penelitian 10

Bab III **Kecamatan Siniu Sebagai Ruang Hidup dan Wilayah Kelola Rakyat 12**
3.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 12
3.2 Kondisi Sosial dan Kependudukan Masyarakat 13
3.3 Mata Pencaharian dan Sistem Penghidupan 13
3.4 Kecamatan Siniu dalam Lanskap Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong 14

Bab IV **Wilayah Kelola Rakyat dan Kerentanan Sosial-Ekologis 16**
4.1 Wilayah Kelola Rakyat dan Sumber Penghidupan 16
4.2 Status dan Penguasaan Lahan 17
4.3 Ruang Hidup yang Dipertahankan Masyarakat 18
4.4 Bahaya Lingkungan dan Kerentanan yang Sudah Ada 20
4.4.1 Kondisi Ruang Hidup dan Bahaya 20
4.4.2 Perubahan Musim dan Kerentanan Penghidupan 22
4.4.3 Rantai Dampak dan Kerentanan Sumber Penghidupan 23
4.5 Aktor dan Relasi Kuasa dalam Perubahan Ruang Hidup 25
4.5.1 Aktor dan Kepentingan 26
4.5.2 Ketimpangan Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan 27

Bab V **Analisis Kawasan Industri Nikel Terhadap Wilayah Kelola Rakyat 29**
5.1 NEPIE dan Perubahan Fungsi Ruang 29
5.2 Pembebasan Lahan dan Perubahan Sumber Penghidupan 31
5.3 Komponen Ruang Hidup yang Berpotensi Terdampak 34
5.4 Penundukan Wilayah Kelola Rakyat sebagai Ruang Hidup 35
5.5 Menguji Klaim Industri Hijau 37

Bab VI **Kesimpulan 39**

Bab VII **Rekomendasi 41**
7.1 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa 41
7.2 Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat dan Pengambil Kebijakan Sektor Industri 42
7.3 Rekomendasi untuk Korporasi 43
7.4 Rekomendasi untuk Masyarakat, Organisasi Rakyat, dan WALHI 43
7.5 Agenda Advokasi Lanjutan 44

Daftar Pustaka 45

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Wilayah bukan sekadar ruang fisik tempat masyarakat bermukim, melainkan ruang hidup yang menopang kehidupan sehari-hari. Kebun, lahan pertanian, sungai, mata air, kawasan pegunungan, wilayah pesisir, dan akses menuju lahan produksi membentuk satu kesatuan yang menyediakan pangan, pendapatan, air bersih, serta berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada pertanian, perkebunan, dan perikanan, keberlanjutan penghidupan sangat bergantung pada terjaganya fungsi ruang hidup tersebut.

Dalam perspektif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Wilayah Kelola Rakyat (WKR) merupakan konsep dan strategi pengelolaan sumber daya alam yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam menguasai, mengelola, memanfaatkan, dan menjaga keberlanjutan wilayahnya. Perspektif ini berpijak pada pengakuan bahwa masyarakat yang hidup dan bekerja di suatu wilayah memiliki pengetahuan, pengalaman, serta kepentingan langsung terhadap masa depan wilayah tersebut. WKR juga berkembang sebagai konsep tanding terhadap model penguasaan sumber daya alam yang menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan serta mengabaikan hak dan pengetahuan mereka atas ruang hidup.

Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, memiliki karakteristik ruang hidup yang ditopang oleh perkebunan, pertanian, sungai, mata air, kawasan pegunungan, dan wilayah pesisir. Pemanfaatan berbagai sumber daya tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi rumah

tangga, tetapi juga membentuk hubungan sosial dan pengetahuan lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Kecamatan Siniu juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung ketahanan pangan Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kabupaten Parigi Moutong memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 27.089,2 hektare dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 38.045,92 hektare. Kecamatan Siniu tercatat memiliki LCP2B seluas 1.206,79 hektare. Data tersebut menunjukkan bahwa Siniu tidak hanya penting sebagai ruang hidup masyarakat, tetapi juga memiliki peran dalam menjaga ketersediaan ruang produksi pangan daerah.

Di tengah fungsi tersebut, Kecamatan Siniu menghadapi rencana pembangunan kawasan industri Neo Energy Parimo Industrial Estate (NEPIE). Menurut laman resmi pengembang, NEPIE merupakan kawasan industri hijau yang berlokasi di Parigi dengan luas sekitar 2.500 hektar dan berstatus Proyek Strategis Nasional sejak 2024. Kawasan tersebut dipromosikan untuk mendukung industri berbasis energi terbarukan dan pengembangan rantai pasok kendaraan listrik. Informasi mengenai luas, status, dan orientasi kawasan tersebut merupakan keterangan resmi pengembang, sedangkan klaim industri hijau masih perlu diuji berdasarkan kondisi sosial dan ekologis wilayah tempat proyek direncanakan.

Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, wilayah yang direncanakan sebagai kawasan industri dipersepsikan memiliki keterkaitan dengan lahan perkebunan, sumber air, jalur produksi, dan ruang lain yang menopang kehidupan warga. Penelitian ini belum melakukan analisis spasial untuk memastikan luas dan lokasi yang bersinggungan antara batas kawasan industri dan ruang hidup masyarakat. Oleh karena itu, informasi mengenai keterkaitan tersebut ditempatkan sebagai persepsi dan indikasi awal yang masih memerlukan verifikasi melalui peta resmi dan analisis spasial.

Rencana perubahan pemanfaatan ruang dalam skala besar menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan Wilayah Kelola Rakyat di Kecamatan Siniu. Persoalannya tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan perubahan penggunaan lahan, tetapi juga dengan akses masyarakat terhadap sumber air, keberlanjutan produksi dan pangan, serta kemampuan masyarakat mempengaruhi keputusan atas wilayah yang selama ini menjadi sumber kehidupan.

Ketimpangan akses terhadap informasi, sumber daya ekonomi, dan kewenangan administratif juga dapat mempengaruhi posisi masyarakat dalam proses perubahan ruang. Dalam kondisi relasi yang tidak setara antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi, penguasaan informasi, keterbatasan partisipasi, perubahan fungsi ruang, serta proses pengadaan lahan berpotensi melemahkan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan sumber penghidupannya.

Penelitian ini dilakukan untuk mendokumentasikan kondisi Wilayah Kelola Rakyat, mengidentifikasi sumber daya dan kerentanan yang mempengaruhi penghidupan masyarakat, serta menganalisis potensi ancaman rencana kawasan industri nikel. Penelitian ini juga membaca relasi kuasa dan berbagai mekanisme yang berpotensi melemahkan posisi masyarakat dalam menentukan masa depan ruang hidupnya.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi karakteristik Wilayah Kelola Rakyat, sumber penghidupan, sumber daya penting, dan aset ekologis yang menopang kehidupan masyarakat di Kecamatan Siniu.
2. Menganalisis tata kuasa atas lahan serta kerentanan sosial-ekologis yang telah dihadapi masyarakat dalam mempertahankan ruang hidupnya dari potensi ancaman rencana kawasan industri nikel terhadap lahan, sumber air, penghidupan masyarakat, fungsi pangan, dan keberlanjutan Wilayah Kelola Rakyat.

3. Mengkaji relasi sosial dan struktur kuasa serta mekanisme yang berpotensi melemahkan posisi masyarakat dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengambilan keputusan atas ruang hidupnya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik Wilayah Kelola Rakyat serta sumber daya yang menopang kehidupan masyarakat di Kecamatan Siniu?
2. Bagaimana tata kuasa atas lahan dan kerentanan sosial-ekologis yang telah dihadapi masyarakat dalam mempertahankan ruang hidupnya dari potensi ancaman rencana pembangunan kawasan industri nikel terhadap lahan, sumber air, penghidupan, fungsi pangan, dan keberlanjutan Wilayah Kelola Rakyat?
3. Bagaimana masyarakat memandang relasi kuasa dan mekanisme yang berpotensi melemahkan posisi masyarakat mempengaruhi masa depan ruang hidup di Kecamatan Siniu?

1.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengumpulan data dilakukan pada lima desa yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Desa Siniu, Desa Siniu Sayogindano, Desa Toraranga, Desa Silanga, dan Desa Towera. Kelima desa tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan Wilayah Kelola Rakyat yang menjadi sumber penghidupan masyarakat sekaligus berada pada wilayah yang dipersepsikan masyarakat berpotensi terdampak oleh rencana pembangunan kawasan industri nikel.

Bab II
Kerangka Konseptual dan Metodologi

2.1 Perspektif Wilayah Kelola Rakyat

Penelitian ini menggunakan perspektif Wilayah Kelola Rakyat (WKR) yang dikembangkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) untuk memahami hubungan antara masyarakat, ruang hidup, dan sumber daya alam. WKR berkembang dari gagasan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang kemudian diperluas cakupannya hingga meliputi berbagai ekosistem, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam perspektif ini, masyarakat ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak, pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan dalam mengelola serta menentukan masa depan wilayah yang menjadi sumber kehidupannya (WALHI, 2022).

WKR menegaskan bahwa wilayah kelola bukan sekadar hamparan lahan atau ruang produksi, melainkan kesatuan ruang hidup yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis bagi masyarakat. Perspektif ini menjadi konsep tanding terhadap model penguasaan sumber daya alam yang menempatkan tanah, air, hutan, pesisir, dan sumber kehidupan lainnya sebagai objek eksploitasi dan akumulasi modal, sementara masyarakat yang hidup dan bergantung pada wilayah tersebut kehilangan akses atau kendali atas sumber kehidupannya.

WALHI menggunakan empat ranah yang saling berkaitan untuk membaca WKR, yaitu tata kuasa, tata kelola, tata produksi, dan tata konsumsi. Tata kuasa berkaitan dengan akses, penguasaan, dan kontrol masyarakat atas wilayah daratan maupun perairan. Tata kelola berkaitan dengan pengaturan dan pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan wilayah berdasarkan pengetahuan masyarakat, nilai-nilai yang berlaku, dan daya

dukung lingkungan. Tata produksi merujuk pada cara masyarakat memanfaatkan potensi setempat untuk menopang kehidupannya tanpa melampaui kemampuan lingkungan. Sementara itu, tata konsumsi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, distribusi hasil produksi, dan upaya memastikan nilai tambah yang adil bagi masyarakat sebagai produsen (WALHI, 2022).

Keempat ranah tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka umum untuk membaca hubungan antara masyarakat dan ruang hidupnya. Namun, berdasarkan jenis dan kedalaman data yang tersedia, analisis hasil penelitian terutama difokuskan pada tata kuasa atas lahan, tata produksi masyarakat, kerentanan sosial-ekologis, serta relasi kuasa dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini belum menghasilkan data yang memadai untuk menganalisis tata konsumsi sebagai tema tersendiri.

Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Siniu dipahami bukan sebagai ruang kosong yang tersedia bagi kepentingan pembangunan, melainkan sebagai wilayah yang telah digunakan dan dikelola masyarakat melalui kegiatan perkebunan, pertanian, perikanan, pemanfaatan sumber air, dan berbagai aktivitas lainnya. Oleh karena itu, perubahan pemanfaatan ruang tidak hanya dibaca sebagai perubahan fungsi lahan, tetapi juga sebagai proses yang berpotensi mempengaruhi akses masyarakat, sumber penghidupan, fungsi ekologis, dan kemampuan masyarakat menentukan masa depan wilayahnya.

2.2 Industri Nikel, Hilirisasi, dan Perubahan Ruang Hidup

Perkembangan industri nikel di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan hilirisasi mineral yang mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Kebijakan tersebut juga menghubungkan industri berbasis nikel dengan rantai pasok kendaraan listrik dan agenda transisi energi global. Meskipun mendorong peningkatan nilai tambah, perkembangan kawasan industri berbasis nikel

juga memperlihatkan distribusi manfaat dan risiko yang tidak selalu merata(Warburton, 2024).

Pembangunan kawasan industri bukan hanya aktivitas produksi, tetapi juga proses perubahan ruang yang membutuhkan lahan, air, energi, infrastruktur, permukiman, dan berbagai layanan pendukung. Pengalaman kawasan industri nikel di Morowali menunjukkan bahwa pertumbuhan industri dapat diikuti peningkatan kebutuhan infrastruktur, mobilitas tenaga kerja, pertumbuhan permukiman, serta tekanan terhadap tata ruang dan lingkungan. Pengalaman tersebut digunakan sebagai pembelajaran pembanding, bukan sebagai bukti bahwa dampak yang sama pasti terjadi di Kecamatan Siniu(Muhyiddin et al., 2026).

Dalam penelitian ini, rencana pembangunan Neo Energy Parimo Industrial Estate (NEPIE) dibaca sebagai proses industrialisasi ruang yang berpotensi mempengaruhi hubungan masyarakat dengan lahan, sumber air, kawasan produksi, dan sumber penghidupan lainnya. Penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa seluruh dampak tersebut pasti terjadi, tetapi mengidentifikasi kondisi ruang hidup dan kerentanan yang perlu diperiksa sebelum perubahan pemanfaatan ruang berlangsung.

Klaim NEPIE sebagai kawasan industri hijau juga tidak diterima sebagai fakta tanpa pengujian. Klaim tersebut perlu dinilai berdasarkan penggunaan lahan, kebutuhan air dan energi, perlindungan sumber pangan, pengelolaan limbah dan emisi, keselamatan ekologis, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

2.3 Relasi Kuasa dan Potensi Penundukan Ruang Hidup

Perubahan ruang hidup tidak berlangsung dalam ruang sosial yang netral. Keputusan mengenai pemanfaatan wilayah dipengaruhi oleh hubungan antara masyarakat, pemerintah, korporasi, dan aktor lain yang memiliki tingkat akses, kewenangan, serta sumber daya yang berbeda.

Foucault (1980) menjelaskan bahwa kuasa tidak hanya bekerja melalui paksaan langsung, tetapi juga melalui pengetahuan, aturan, kebijakan, dan praktik yang mempengaruhi cara individu maupun kelompok mengambil keputusan. Dalam konteks penguasaan lahan, Hall et al. (2011) menunjukkan bahwa akses terhadap ruang dan sumber daya dibentuk oleh regulasi, pasar, kekuatan, dan legitimasi. Mekanisme tersebut mempengaruhi siapa yang memperoleh akses, siapa yang mampu mempertahankannya, dan siapa yang berpotensi tersingkir.

Scott (1985) menunjukkan bahwa masyarakat yang berada dalam posisi subordinat tidak selalu memiliki ruang yang setara untuk mempengaruhi keputusan. Dalam kondisi tersebut, negosiasi, strategi bertahan, dan perlawanan sehari-hari dapat muncul sebagai cara mempertahankan kepentingan dan sumber kehidupan.

Dalam penelitian ini, istilah *penundukan* digunakan untuk membaca mekanisme yang berpotensi melemahkan kemampuan masyarakat dalam menentukan, mempertahankan, dan mengelola ruang hidupnya. Mekanisme tersebut dapat berupa ketimpangan informasi, keterbatasan partisipasi, ketimpangan posisi tawar, atau berkurangnya kontrol masyarakat atas sumber daya yang menopang kehidupannya.

2.4 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan yang memadukan survei dan *Participatory Action Research* (PAR). Survei digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai sumber penghidupan, penguasaan lahan, dan kondisi sosial-ekonomi responden. Sementara itu, PAR digunakan untuk mendokumentasikan pengetahuan masyarakat mengenai ruang hidup, bahaya, perubahan musim, kerentanan, dan relasi antar aktor.

PAR menempatkan masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam identifikasi masalah, analisis kondisi wilayah, produksi pengetahuan, dan

pembacaan terhadap perubahan sosial (Kindon et al., 2007). Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi turut menafsirkan kondisi dan perubahan yang terjadi pada wilayahnya.

Survei dilakukan melalui wawancara menggunakan kuesioner terhadap 83 responden yang berasal dari lima desa penelitian. Responden memberikan informasi mengenai sumber penghidupan, komoditas yang dikelola, luas dan status penguasaan lahan, serta kondisi sosial-ekonomi rumah tangga.

Proses PAR melibatkan unsur masyarakat dari lima desa penelitian, termasuk tokoh masyarakat, perempuan, dan pemuda. Kegiatan yang dilakukan meliputi diskusi kelompok, penyusunan peta sosial dan bahaya desa, kalender musim, lini masa sejarah desa, analisis pembagian kerja, analisis pengambilan keputusan rumah tangga, rantai dampak, matriks kerentanan, serta pemetaan aktor.

Selain data primer, penelitian menggunakan data sekunder dari publikasi statistik, peraturan daerah, laman resmi pengembang, literatur akademik, dan dokumen lain yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memberikan konteks wilayah dan memeriksa konsistensi informasi yang diperoleh dari masyarakat.

2.5 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner terhadap 83 responden dan melalui proses *Participatory Action Research* (PAR) bersama masyarakat. Survei digunakan untuk memperoleh data mengenai sumber penghidupan, komoditas yang dikelola, luas lahan, status penguasaan lahan, dan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga.

Dalam proses PAR, masyarakat menyusun peta sosial dan bahaya desa, kalender musim, rantai dampak, serta matriks kerentanan sumber penghidupan. Pemetaan aktor dan relasi kuasa juga dilakukan untuk

mengidentifikasi kepentingan, sumber pengaruh, hubungan antaraktor, serta tingkat pengaruh dan ketergantungan masing-masing aktor terhadap ruang hidup masyarakat.

Data kuantitatif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden, sumber penghidupan, luas lahan, dan status penguasaan lahan. Apabila satu responden menyebutkan lebih dari satu jenis komoditas, setiap jawaban dihitung sebagai pencatatan komoditas, bukan sebagai jumlah responden. Data kualitatif digunakan untuk memahami pengetahuan masyarakat mengenai ruang hidup, pengalaman menghadapi bahaya, perubahan musim, kerentanan penghidupan, persepsi terhadap rencana kawasan industri, dan relasi antaraktor.

Analisis dilakukan secara deskriptif-partisipatif dengan membaca silang data survei, hasil PAR, wawancara warga, dokumen perusahaan dan pemerintah, data sekunder, dan catatan lapangan. Triangulasi digunakan untuk memeriksa konsistensi antar jenis data.

2.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian awal untuk mendokumentasikan kondisi Wilayah Kelola Rakyat dan mengidentifikasi potensi ancaman terhadap ruang hidup masyarakat di Kecamatan Siniu. Penelitian tidak dirancang sebagai kajian AMDAL, kajian hidrologi, analisis spasial terperinci, audit hukum, atau kajian teknis industri. Penelitian juga belum menghasilkan peta batas resmi NEPIE, peta persil masyarakat, maupun analisis tumpang-susun antara rencana kawasan industri, lahan masyarakat, sumber air, dan LCP2B. Karena itu, penelitian belum dapat menentukan secara pasti luas ruang hidup yang beririsan dengan rencana kawasan industri.

Hasil survei menggambarkan kondisi 83 responden dan tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh penduduk Kecamatan Siniu tanpa desain

sampel yang representatif. Temuan PAR mencerminkan pengetahuan dan pengalaman peserta yang terlibat, sedangkan analisis relasi kuasa dan potensi penundukan merupakan pembacaan sosial, bukan pembuktian terhadap pelanggaran hukum tertentu. Penelitian hanya menggunakan hasil PAR yang memiliki data cukup dan relevan dengan tujuan penelitian. Perangkat lapangan yang datanya belum memadai tidak dikembangkan menjadi temuan tersendiri.

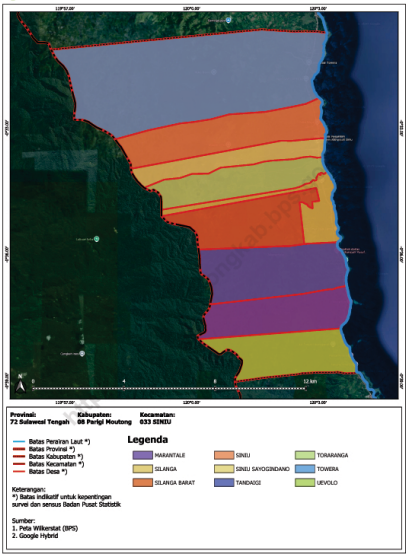
Meskipun memiliki keterbatasan, penelitian ini menyediakan data dasar mengenai sumber penghidupan, penguasaan lahan, sumber daya penting, bahaya, kerentanan, dan hubungan antar aktor. Temuan tersebut dapat menjadi pijakan bagi pemetaan spasial, kajian sumber air, penelitian sosial-ekonomi rumah tangga, pemeriksaan dokumen lingkungan, dan penelitian lanjutan mengenai dampak pembangunan kawasan industri.

Bab III

Kecamatan Siniu Sebagai Ruang Hidup dan Wilayah Kelola Rakyat

3.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kecamatan Siniu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong yang berada di kawasan pesisir Teluk Tomini. Wilayahnya mencakup pegunungan, perbukitan, sungai, kawasan perkebunan, lahan pertanian, permukiman, dan wilayah pesisir. Berdasarkan Kecamatan Siniu dalam Angka 2025, Kecamatan Siniu memiliki luas 107,35 km² dan terdiri atas sembilan desa, yaitu Marantale, Tandaigi, Silanga, Siniu, Towera, Toraranga, Uevolo, Siniu Sayogindano, dan Silanga Barat.



Gambar 3.1.
Peta wilayah kecamatan siniu 2024
Sumber: BPS Parigi Moutong

Bentang wilayah tersebut memperlihatkan keterhubungan antara kawasan pegunungan dan bagian hulu, sungai, lahan produksi, permukiman, serta wilayah pesisir. Berdasarkan pengalaman masyarakat, kawasan pegunungan dan bagian hulu memiliki arti penting bagi keberadaan sumber air, sedangkan perkebunan, pertanian, dan pesisir menjadi ruang produksi yang menopang kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Siniu tidak hanya berfungsi sebagai ruang permukiman. Wilayah ini juga menjadi ruang produksi dan ruang ekologis yang menghubungkan kehidupan masyarakat dengan lahan, air, serta sumber daya pesisir.

3.2 Kondisi Sosial dan Kependudukan Masyarakat

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Siniu berjumlah 10.412 jiwa, terdiri atas 5.388 laki-laki dan 5.024 perempuan. Dengan luas wilayah 107,35 km², kepadatan penduduknya mencapai 96,99 jiwa per km². Desa Towera memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni 1.789 jiwa, diikuti Desa Siniu sebanyak 1.744 jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Desa Siniu Sayogindano sebanyak 660 jiwa.

Kependudukan Kecamatan Siniu perlu dibaca dalam hubungannya dengan sumber penghidupan yang tersedia. Sebagian masyarakat masih menjalankan kegiatan ekonomi yang bergantung pada lahan dan sumber daya alam, terutama perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Karena itu, perubahan akses terhadap lahan, air, atau wilayah pesisir dapat berpengaruh langsung terhadap kehidupan ekonomi rumah tangga.

3.3 Mata Pencaharian dan Sistem Penghidupan

Sistem penghidupan masyarakat Kecamatan Siniu bertumpu pada pemanfaatan sumber daya darat dan pesisir. Perkebunan dan pertanian menjadi kegiatan penting bagi masyarakat yang mengelola lahan, sedangkan perikanan menjadi bagian dari penghidupan masyarakat pesisir.

Komoditas yang dikelola masyarakat meliputi kelapa, kakao, nilam, pala, cengkeh, jagung, tanaman hortikultura, dan berbagai tanaman lainnya. Hasil produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun sebagai sumber pendapatan.



Gambar 3.2. Kebun masyarakat sebagai salah satu sumber penghidupan utama di Kecamatan Siniu. Sumber: Dokumentasi penelitian.

Kegiatan perikanan tangkap juga masih berlangsung di Kecamatan Siniu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem penghidupan masyarakat tidak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga pada akses terhadap wilayah pesisir dan laut. Data rinci mengenai sumber penghidupan, komoditas, luas lahan, dan status penguasaan lahan dibahas pada Bab IV.

3.4 Kecamatan Siniu dalam Lanskap Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong

Kecamatan Siniu memiliki posisi penting dalam kebijakan perlindungan lahan pangan Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kecamatan Siniu ditetapkan memiliki Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 1.206,79 hektare.

Penetapan LCP2B menunjukkan bahwa sebagian wilayah Kecamatan Siniu disiapkan untuk mendukung keberlanjutan ruang produksi pangan. Fungsi tersebut menjadi penting dalam menghadapi tekanan alih fungsi lahan dan perubahan penggunaan ruang dalam jangka panjang.

Data BPS menunjukkan bahwa kegiatan produksi berbasis lahan masih berlangsung di Kecamatan Siniu. Masyarakat menghasilkan komoditas hortikultura, buah-buahan tahunan, hasil peternakan, dan perikanan. Produksi mangga, pisang, alpukat, durian, dan rambutan yang tercatat pada 2024 menunjukkan bahwa lahan dan sumber daya alam masih menjadi bagian penting dari ekonomi lokal.

Keberadaan LCP2B dan kegiatan produksi masyarakat menunjukkan bahwa Kecamatan Siniu memiliki dua fungsi yang saling berkaitan. Wilayah ini menjadi ruang penghidupan masyarakat sekaligus bagian dari cadangan ruang produksi pangan daerah. Karena itu, setiap rencana perubahan pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan keberlanjutan lahan produktif, sumber air, akses produksi, dan fungsi pangan yang telah ditetapkan.

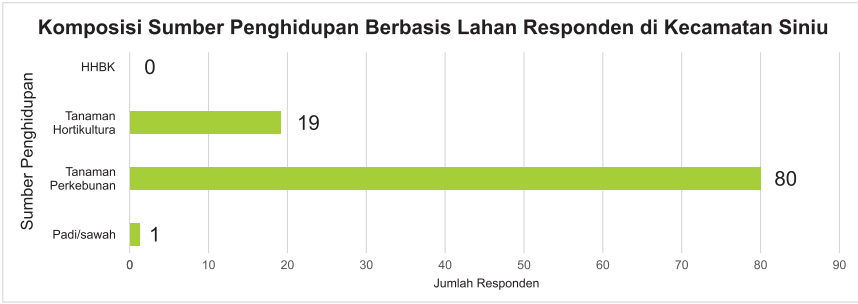
Bab IV

Wilayah Kelola Rakyat dan Kerentanan Sosial-Ekologis

4.1 Wilayah Kelola Rakyat dan Sumber Penghidupan

Wawancara terhadap 83 responden di lima desa menunjukkan bahwa sistem penghidupan berbasis lahan didominasi oleh perkebunan. Dari seluruh jawaban responden, diperoleh 80 pencatatan perkebunan, 19 pencatatan hortikultura, dan satu pencatatan padi atau sawah. Jumlah pencatatan lebih besar daripada jumlah responden karena satu responden dapat mengelola lebih dari satu jenis komoditas.

Komoditas yang disebutkan responden meliputi kelapa, kakao, nilam, pala, cengkeh, jagung, dan berbagai tanaman lainnya. Hasil produksi digunakan untuk menopang pendapatan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.



Gambar 4.1. Komposisi Sumber Penghidupan Berbasis Lahan Responden di Kecamatan Siniu. Sumber: Hasil survei terhadap 83 responden masyarakat di Kecamatan Siniu.

Grafik tersebut memperlihatkan dominasi perkebunan dalam struktur penghidupan responden. Sebagian besar responden mengelola lahan seluas satu hingga dua hektare. Meskipun relatif kecil, lahan tersebut memiliki fungsi penting sebagai ruang produksi dan sumber penghidupan rumah tangga.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi responden sangat bergantung pada akses terhadap lahan produktif. Karena itu, bentuk dan kepastian penguasaan lahan menjadi penting dalam menilai kemampuan masyarakat mempertahankan sumber penghidupannya ketika terjadi perubahan pemanfaatan ruang.

4.2 Status dan Penguasaan Lahan

Akses dan penguasaan lahan menentukan kemampuan masyarakat menjalankan kegiatan produksi dan mempertahankan sumber penghidupannya. Dalam konteks perubahan pemanfaatan ruang, bentuk pengakuan administratif atas lahan juga dapat mempengaruhi posisi masyarakat ketika berhadapan dengan proses pengadaan atau perubahan fungsi ruang.

Tabel 4.1. Status Penguasaan Lahan Responden di Kecamatan Siniu

72.3%	21.7%	4.8%	1.2%
SHM	SKT	Kwitansi Jual Beli	Lahan Garapan
60 responden	18 responden	4 responden	1 responden

Sebagian besar responden memiliki bukti penguasaan berupa Sertifikat Hak Milik. Namun, 23 responden masih menggunakan SKT, kuitansi jual beli, atau mengelola lahan garapan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepastian administratif lahan responden tidak sepenuhnya sama.

Dokumen formal bukan satu-satunya dasar hubungan masyarakat dengan lahan. Bagi masyarakat, lahan juga merupakan ruang produksi yang berkaitan dengan riwayat pengelolaan keluarga dan keberlanjutan penghidupan. Karena itu, penguasaan lahan perlu dibaca melalui legalitas administratif sekaligus fungsi sosial dan ekonominya.

Lahan juga tidak berdiri sendiri. Keberlangsungan produksi bergantung pada sumber air, jalan menuju kebun, sungai, kawasan pegunungan, dan wilayah pesisir. Keterhubungan tersebut dibahas pada bagian berikutnya.

4.3 Ruang Hidup yang Dipertahankan Masyarakat

Hasil diskusi dan analisis partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat memandang ruang hidup sebagai kesatuan yang mencakup lahan produksi, mata air, sungai, kawasan pegunungan, wilayah pesisir, serta akses menuju tempat produksi. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling mendukung kehidupan sehari-hari.

Kebun dan lahan pertanian menjadi ruang produksi, mata air digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan wilayah pesisir dan laut menopang kegiatan perikanan. Kawasan pegunungan dan bagian hulu dipahami masyarakat memiliki arti penting bagi keberadaan sumber air. Karena itu, perubahan pada satu bagian wilayah dipersepsikan dapat mempengaruhi fungsi ruang lainnya.

Ketergantungan terhadap berbagai komponen ruang hidup membuat penghidupan masyarakat peka terhadap perubahan lingkungan. Masyarakat telah menghadapi banjir, angin kencang, kemarau, dan perubahan musim yang mempengaruhi aktivitas produksi serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Gambar 4.2 Bentang Ruang Hidup Masyarakat Kecamatan Siniu
Sumber: Dokumentasi penelitian.



4.4 Bahaya Lingkungan dan Kerentanan yang Sudah Ada

4.4.1 Kondisi Ruang Hidup dan Bahaya

Dalam proses PAR, masyarakat menyusun peta sosial dan budaya desa untuk mengidentifikasi permukiman, sumber penghidupan, fasilitas umum, sumber daya penting, dan lokasi yang dianggap memiliki risiko. Peta tersebut tidak menggambarkan batas persil atau batas administrasi secara rinci, tetapi merekam pengetahuan masyarakat mengenai ruang hidup dan sebaran bahaya.

Gambar 4.3 Proses penyusunan peta sosial dan bahaya desa bersama masyarakat Kecamatan Siniu. Sumber: Dokumentasi PAR



Gambar 4.4 Peta sosial dan bahaya desa yang disusun masyarakat melalui proses PAR.
Sumber: Dokumentasi PAR



Tabel 4.2 Aset Penting, Bahaya Utama, dan Dampak yang Diidentifikasi Masyarakat Menurut Desa

Desa	Aset penting yang diidentifikasi	Bahaya utama	Dampak yang disebutkan
Silanga	Mata air, kebun, sungai	Luapan sungai	Gangguan terhadap permukiman dan kebutuhan air
Siniu	Perkebunan, mata air	Banjir	Gangguan terhadap lahan dan sumber air
Toraranga	Sungai, mata air	Banjir	Gangguan aktivitas dan penurunan kualitas air
Siniu Sayogindano	Perkebunan, sumber air, sungai	Peningkatan debit sungai	Gangguan akses dan aktivitas produksi

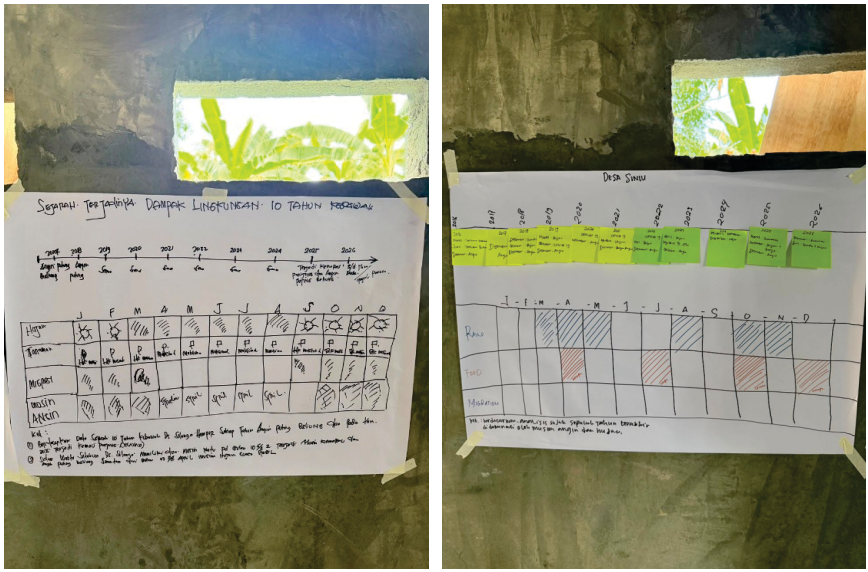
Pemetaan menunjukkan pola yang relatif serupa. Sumber air, sungai, dan lahan produksi menjadi aset penting, sedangkan banjir merupakan bahaya yang paling sering disebut. Pengetahuan masyarakat tersebut membantu mengidentifikasi hubungan antara gangguan lingkungan, akses terhadap air, dan keberlangsungan aktivitas produksi.

4.4.2 Perubahan Musim dan Kerentanan Penghidupan

Kalender musim disusun untuk menggambarkan hubungan antara curah hujan, kemarau, angin kencang, aktivitas produksi, dan kejadian bahaya. Hasilnya menunjukkan bahwa waktu tanam, panen, berkebun, dan melaut sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi cuaca dan musim.

Masyarakat mengidentifikasi angin kencang, kemarau, dan hujan deras sebagai kondisi yang paling sering mempengaruhi penghidupan. Angin kencang dapat mengganggu perkebunan dan perikanan, kemarau mempengaruhi ketersediaan air, sedangkan hujan deras dapat menyebabkan banjir dan menurunkan kualitas sumber air.

Gambar 4.5 Kalender musim masyarakat hasil analisis partisipatif.
Sumber: Dokumentasi PAR



Kalender musim menunjukkan bahwa kerentanan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kejadian bahaya, tetapi juga dengan tingginya

ketergantungan kegiatan produksi terhadap kestabilan kondisi lingkungan.

4.4.3 Rantai Dampak dan Kerentanan Sumber Penghidupan

Masyarakat memahami angin kencang, kemarau, dan banjir sebagai peristiwa yang dapat memicu dampak lanjutan terhadap produksi, pendapatan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

A. Rantai Dampak Angin Kencang

Angin kencang disebut berdampak pada tanaman perkebunan, aktivitas melaut, dan permukiman. Rusaknya tanaman atau terhentinya aktivitas melaut dapat mengurangi produksi dan pendapatan rumah tangga.

Gambar 4.6 Rantai Dampak Angin Kencang
Sumber: Hasil analisis partisipatif



B. Rantai Dampak Kemarau Panjang

Kemarau menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bagi kebutuhan rumah tangga dan aktivitas produksi. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi pertanian, perkebunan, dan ketersediaan pakan ternak.

Gambar 4.7 Rantai Dampak Kemarau Panjang
Sumber: Hasil analisis partisipatif



C. Rantai Dampak Curah Hujan Tinggi dan Banjir

Curah hujan tinggi dapat menyebabkan banjir, mengganggu lahan produksi, dan membuat sumber air menjadi keruh. Dampak lanjutannya mencakup penurunan produksi, gangguan kesehatan, dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga untuk pemulihan.

Gambar 4.8 Rantai Dampak Curah Hujan Tinggi dan Banjir
Sumber: Hasil analisis partisipatif



Selain menganalisis rantai dampak, masyarakat juga melakukan penilaian terhadap tingkat kerentanan berbagai sektor sumber

penghidupan terhadap bahaya yang mereka hadapi. Penilaian dilakukan secara partisipatif menggunakan skala 0 sampai 3, di mana angka 0 menunjukkan tidak terdampak, angka 1 menunjukkan kerentanan rendah, angka 2 menunjukkan kerentanan sedang, dan angka 3 menunjukkan kerentanan tinggi.

Tabel 4.3. Tingkat Kerentanan Sumber Penghidupan terhadap Bahaya Lingkungan

Sektor	Angin	Hujan Deras	Kekeringan
Pertanian	3	3	3
Bisnis	1–2	2–3	1–2
Ternak	2–3	2–3	3
Hutan	1–3	0–1	2–3
Nelayan	3	2–3	0–1
Perkebunan	3	1	3
Keterangan: 0 = tidak berdampak; 1 = rendah; 2 = sedang; 3 = tinggi. Rentang skor menunjukkan variasi penilaian yang muncul selama proses partisipatif.			

Penilaian menunjukkan bahwa pertanian rentan terhadap ketiga bahaya, sedangkan perkebunan dinilai sangat rentan terhadap angin dan kekeringan. Perikanan paling rentan terhadap angin serta hujan deras. Perbedaan skor memperlihatkan bahwa setiap jenis penghidupan memiliki paparan yang berbeda terhadap bahaya.

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menghadapi tekanan ekologis sebelum adanya perubahan ruang akibat pembangunan kawasan industri. Kondisi tersebut penting untuk membaca potensi penambahan kerentanan pada Bab V.

4.5 Aktor dan Relasi Kuasa dalam Perubahan Ruang Hidup

Perubahan ruang dipengaruhi oleh aktor yang memiliki kepentingan, sumber daya, dan tingkat pengaruh yang berbeda. Masyarakat memiliki

ketergantungan langsung terhadap lahan, sumber air, dan wilayah produksi, sedangkan pemerintah dan pelaku investasi memiliki kewenangan, akses informasi, serta sumber daya yang lebih besar untuk mempengaruhi keputusan.

4.5.1 Aktor dan Kepentingan

Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan pemetaan aktor, terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kepentingan dan sumber pengaruh berbeda terhadap perubahan ruang hidup di Kecamatan Siniu.

Tabel 4.4 Aktor, Kepentingan, dan Pengaruh terhadap Ruang Hidup di Kecamatan Siniu

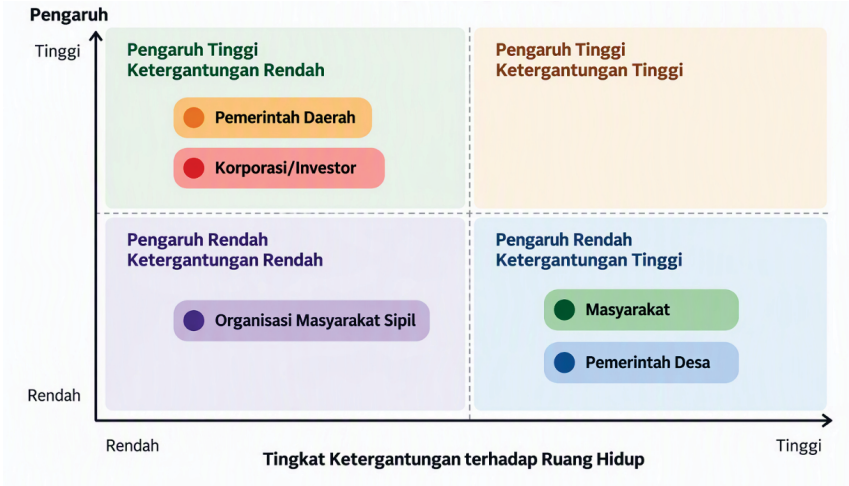
Aktor	Kepentingan Utama	Sumber Pengaruh	Potensi Pengaruh terhadap Ruang Hidup
Masyarakat	Mempertahankan sumber penghidupan, sumber air, lahan produksi, dan ruang hidup	Penguasaan lahan, pengetahuan lokal, jejaring sosial	Mempertahankan keberlanjutan sistem penghidupan masyarakat
Pemerintah Desa	Administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan desa	Kewenangan administratif, informasi, hubungan dengan masyarakat	Mempengaruhi penyampaian informasi dan proses pengambilan keputusan di tingkat desa
Pemerintah Daerah	Pengelolaan pembangunan wilayah, investasi, dan tata ruang	Kewenangan perencanaan dan kebijakan	Menentukan arah pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah
Korporasi/Investor	Pengembangan kawasan industri dan investasi	Modal, jaringan bisnis, akses terhadap proses investasi	Berpotensi mempengaruhi perubahan pemanfaatan ruang dan kebutuhan lahan
Tokoh Masyarakat	Menjaga kepentingan komunitas dan stabilitas sosial	Pengaruh sosial dan kepercayaan masyarakat	Mempengaruhi pembentukan opini dan sikap masyarakat
Organisasi Masyarakat Sipil	Perlindungan lingkungan, hak masyarakat, dan keadilan ekologis	Advokasi, pendampingan, dan produksi pengetahuan	Memperkuat posisi masyarakat dalam mempertahankan ruang hidup

Tabel tersebut menggambarkan perbedaan kepentingan dan sumber pengaruh, bukan penilaian terhadap tindakan individu. Kategori aktor digunakan agar identitas informan dan pihak tertentu tidak diungkap tanpa dasar verifikasi yang memadai.

4.5.2 Ketimpangan Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan

Hasil analisis menunjukkan bahwa akses terhadap informasi, kewenangan administratif, jaringan politik, dan sumber daya ekonomi mempengaruhi kemampuan aktor dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat memiliki ketergantungan paling tinggi terhadap ruang hidup, tetapi tidak selalu memiliki tingkat pengaruh yang setara dengan pemerintah dan pelaku investasi.

Gambar 4.9 Tingkat Pengaruh dan Tingkat Ketergantungan Aktor terhadap Ruang Hidup
Sumber: Analisis peneliti berdasarkan hasil pemetaan aktor dan diskusi kelompok.



Catatan: Tingkat pengaruh dan ketergantungan merupakan penilaian kualitatif berdasarkan hasil diskusi kelompok dan pemetaan aktor. Kategori tersebut tidak menunjukkan ukuran statistik.

Matriks tersebut menunjukkan ketimpangan antara pihak yang paling bergantung pada ruang hidup dan pihak yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap perubahan wilayah. Masyarakat bergantung langsung pada lahan, sumber air, wilayah produksi, dan sumber daya lainnya. Sebaliknya, aktor dengan tingkat pengaruh lebih besar tidak selalu

memiliki tingkat ketergantungan atau menanggung konsekuensi langsung yang sama ketika fungsi ruang berubah. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memperoleh informasi, berpartisipasi, menyampaikan keberatan, dan mempengaruhi keputusan yang menyangkut wilayahnya.

Karena itu, perlindungan Wilayah Kelola Rakyat tidak cukup dilakukan melalui perlindungan lahan dan sumber daya alam. Perlindungan juga memerlukan keterbukaan informasi, partisipasi yang bermakna, dan penguatan posisi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi ruang hidupnya.

Temuan mengenai penghidupan, kerentanan, dan relasi kuasa tersebut menjadi dasar untuk menganalisis potensi ancaman rencana pembangunan kawasan industri nikel pada Bab V.

Bab V

Analisis Kawasan Industri Nikel Terhadap Wilayah Kelola Rakyat

5.1 NEPIE dan Perubahan Fungsi Ruang

Rencana pembangunan Neo Energy Parimo Industrial Estate (NEPIE) membutuhkan kawasan seluas 2.500 hektar di Kecamatan Siniu. Dokumen profil proyek menyebut PT Anugrah Teknik Industri sebagai badan usaha pengelola kawasan. Kegiatan yang direncanakan meliputi pengolahan bahan baku baterai, pabrik HPAL, nikel sulfat, produksi dan daur ulang baterai, pembangkit listrik, pelabuhan, pengolahan air, pengelolaan limbah, pergudangan, dan permukiman pekerja. Dalam pengembangan pertama bermitra dengan perusahaan ENPI - China Nonferorous Enggineering Co,. Ltd, sebuah perusahaan EPC untuk pembangunan pabrik hidrometalurgi.[1]

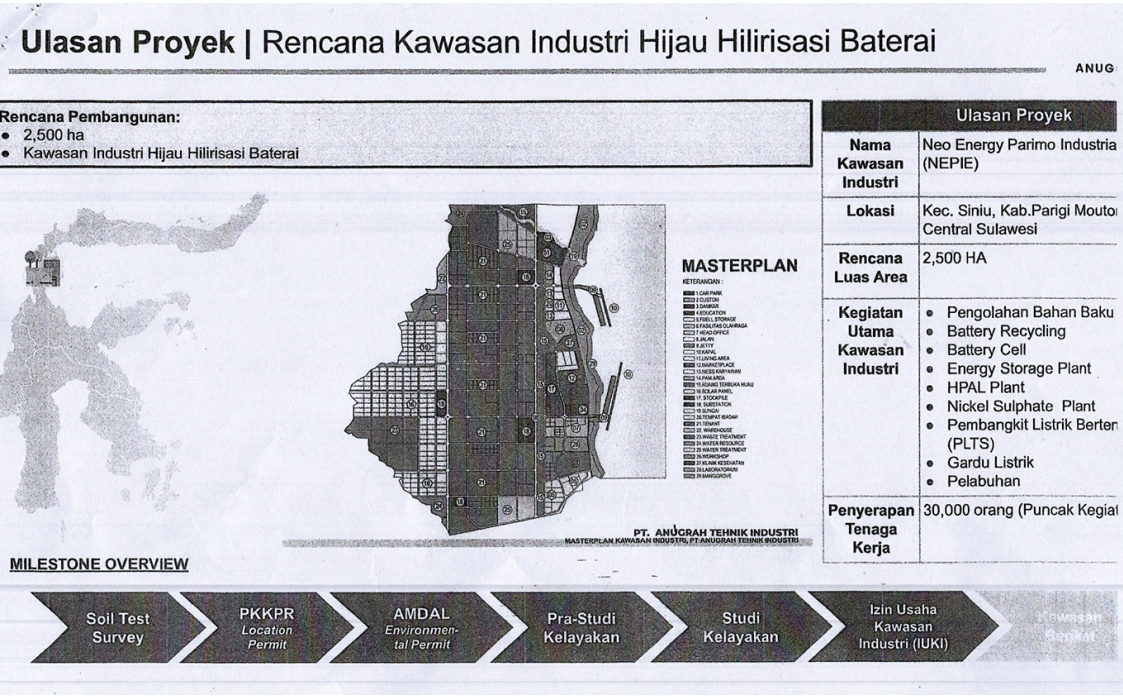
Dokumen proyek juga memuat PKKPR, keputusan kelayakan lingkungan tahun 2023, izin usaha kawasan industri tahun 2024, serta surat yang menyatakan NEPIE sebagai Proyek Strategis Nasional nomor proyek 114. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa tahapan administratif proyek telah berjalan. Namun, keberadaan perizinan tidak dengan sendirinya menjawab bagaimana perubahan ruang akan mempengaruhi masyarakat dan fungsi ekologis wilayah.

Laporan survei kesesuaian tata ruang menunjukkan bahwa lokasi usulan mencakup kawasan perkebunan, hortikultura, tanaman pangan,

1 PT Anugrah Tehnik Industry, Neo Energy Parimo Industrial Estate: Project Profile, Februari 2026, dokumen internal perusahaan. Salinan diperoleh tim penelitian dari masyarakat melalui dokumen yang sebelumnya beredar di tingkat pemerintah desa.

permukiman perdesaan, sempadan sungai dan sempadan pantai. Dokumen tersebut mencatat sekitar 976 hektar kawasan perkebunan, 730 hektar kawasan tanaman pangan, 551 hektar kawasan hortikultura, dan 232 hektar kawasan permukiman perdesaan dalam area yang dianalisis. Data tersebut menunjukkan bahwa rencana kawasan industri berada pada bentang ruang yang telah memiliki fungsi produksi dan permukiman.[2]

Gambar 5.1 Rencana Kawasan dan Fasilitas Neo Energy Parimo Industrial Estate
Sumber: Profil proyek PT Anugrah Tehnik Industry, 2026.



[2] Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, *Laporan Pelaksanaan Survei Kesesuaian Tata Ruang atas Rencana Lokasi Pembangunan Kawasan Industri PT Anugerah Tehnik Industri, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah*, tanpa tahun. Dokumen memuat hasil survei lokasi, pola ruang, kelerengan, kerawanan bencana, penggunaan lahan, dan kesesuaian lahan.

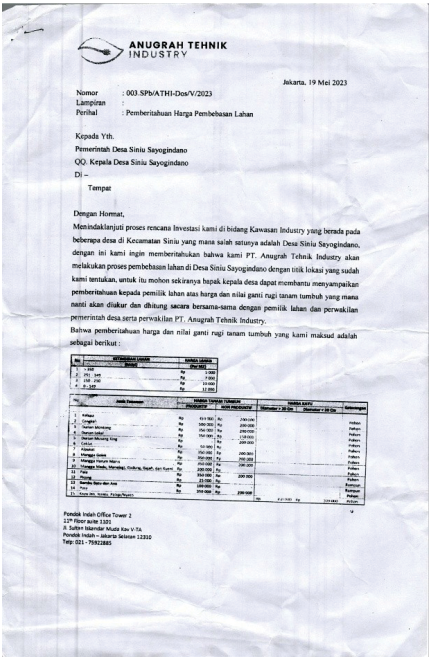
5.2 Pembebasan Lahan dan Perubahan Sumber Penghidupan

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim peneliti proses pembebasan lahan mulai berlangsung sejak tahun 2023. Saat ini, luas lahan yang telah dibebaskan diperkirakan telah mencapai 300 hektar sebagai bagian awal dari perubahan ruang untuk pembangunan kawasan industri.

Pada 19 Mei 2023, PT Anugrah Tehnik Industry menyampaikan surat Pemberitahuan Harga Pembebasan Lahan kepada Pemerintah Desa Siniu Sayogindano mengenai harga pembebasan lahan dan nilai tanaman. Surat tersebut menunjukkan bahwa harga lahan dibedakan berdasarkan ketinggian lokasi, sedangkan tanaman di atas lahan dinilai berdasarkan jenis dan tingkat produktivitasnya.[3]

[3] PT Anugrah Tehnik Industry, Surat Nomor 003.SPb/ATHI-Dos/V/2023 tentang *Pemberitahuan Harga Pembebasan Lahan*, 19 Mei 2023, ditujukan kepada Pemerintah Desa Siniu Sayogindano. Surat memuat klasifikasi harga berdasarkan ketinggian lahan dan nilai sejumlah tanaman.

Gambar 5.2 Surat pemberitahuan harga pembebasan lahan dan tanaman
Sumber: PT Anugrah Tehnik Industry, Surat Nomor 003.SPb/ATHI-Dos/V/2023, 19 Mei 2023; salinan diperoleh dari masyarakat.



ANUGRAH TEHNIK
INDUSTRY

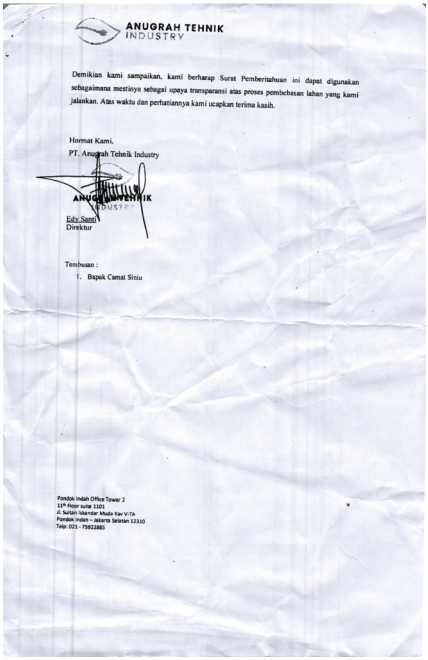
Jakarta, 19 Mei 2023

Nomor : 003.SPb/ATHI-Dos/V/2023
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Harga Pembebasan Lahan

Kepada Yth.
Pimerintah Desa Siniu Sayogindano
QQ. Kepala Desa Siniu Sayogindano
Di –
Tempat

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti proses rencana Investasi kami di bidang Kawasan Industry yang berada pada beberapa desa di Kecamatan Siniu yang mana salah satunya adalah Desa Siniu Sayogindano, dengan ini kami ingin memberitahukan bahwa kami PT. Anugrah Tehnik Industry akan melakukan proses pembebasan lahan di Desa Siniu Sayogindano dengan titik lokasi yang sudah kami tentukan, untuk itu mohon sekiranya bapak kepala desa dapat membantu menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik lahan atas harga dan nilai ganti rugi tanam tumbuh yang mana nanti akan diukur dan dihitung secara bersama-sama dengan pemilik lahan dan perwakilan pemerintah desa serta perwakilan PT. Anugrah Tehnik Industry.
Bahwa pemberitahuan harga dan nilai ganti rugi tanam tumbuh yang kami maksud adalah sebagai berikut :

Pondok Indah Office Tower 2
12th Floor suite 1101
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA
Pondok Indah – Jakarta Selatan 12310
Telp: 021 - 75922885



ANUGRAH TEHNIK
INDUSTRY

Demikian kami sampaikan, kami berharap Surat Pemberitahuan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya sebagai upaya transparansi atas proses pembebasan lahan yang kami jalankan. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Anugrah Tehnik Industry

ANUGRAH TEHNIK
INDUSTRY

Edy Santi
Direktur

Tembusan :
1. Bapak Camat Siniu

Pondok Indah Office Tower 2
12th Floor suite 1101
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA
Pondok Indah – Jakarta Selatan 12310
Telp: 021 - 75922885

Keterangan seorang warga Desa Siniu menunjukkan adanya perbedaan informasi mengenai harga dan status pembayaran lahan yang berkembang di masyarakat.

> *“Di Desa Siniu terdapat lebih dari 30 kepala keluarga yang telah menjual lahan produktif mereka, dengan luas yang berbeda-beda, mulai dari sekitar setengah hektar, satu hektar, dua hektar, hingga lebih dari dua hektare. Pada awal proses pembelian lahan tahun 2023, harga yang diterima masyarakat sekitar Rp2.000 per meter persegi. Namun, dalam prosesnya masih*

terdapat masyarakat yang mengaku belum menerima pembayaran secara penuh, bahkan ada lahan yang menurut pemiliknya belum dibayarkan sama sekali. Kondisi tersebut juga dialami oleh orang tua saya, karena masih terdapat bagian lahan yang sampai sekarang belum dibayarkan.

Kami juga mendapatkan informasi yang berbeda mengenai harga tanah. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kabupaten Parigi Moutong dan pemerintah daerah, pihak perusahaan menyampaikan harga lahan berada pada kisaran Rp7.000 sampai Rp12.000 per meter persegi. Sementara itu, informasi yang disampaikan pihak kecamatan menyebutkan kisaran harga mulai dari Rp5.000 sampai Rp12.000 per meter persegi.

Lahan yang telah dilepaskan masyarakat bukanlah lahan kosong. Sebagian besar merupakan lahan produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga, karena di dalamnya terdapat tanaman kelapa, kakao, durian, cengkeh, nilam, serta berbagai tanaman produktif lainnya. Setelah lahan dijual dan dikosongkan, sebagian warga mulai merasakan dampaknya. Ada warga yang menyesali keputusan menjual lahan karena setelah kehilangan kebun, mereka juga kehilangan sumber pendapatan yang sebelumnya diperoleh dari hasil mengelola lahan tersebut." Akbar, warga Desa Siniu

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pembebasan lahan tidak hanya berkaitan dengan harga tanah, tetapi juga dengan tanaman produktif dan sumber pendapatan rumah tangga.

5.3 Komponen Ruang Hidup yang Berpotensi Terdampak

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat tiga komponen yang perlu diperhatikan dalam menilai potensi perubahan ruang.

1. Lahan produktif

Perkebunan merupakan sumber penghidupan berbasis lahan yang paling dominan di antara responden. Sebagian besar responden mengelola lahan seluas satu hingga dua hektare dan menggunakan hasilnya untuk menopang kebutuhan rumah tangga.

Perubahan penggunaan lahan dapat mengurangi ruang produksi, mengubah akses menuju kebun, atau memisahkan lahan dari sumber air dan jalan produksi. Konsekuensinya tidak hanya ditentukan oleh luas lahan yang berubah, tetapi juga oleh fungsi lahan tersebut bagi penghidupan masyarakat.

2. Sumber air

Masyarakat di beberapa desa menggunakan mata air dari kawasan pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil PAR menunjukkan bahwa masyarakat memahami adanya keterhubungan antara kawasan hulu, mata air, sungai, permukiman, dan lahan produksi.

Penelitian ini belum dapat menyimpulkan dampak NEPIE terhadap debit atau kualitas air. Namun, kebutuhan air kawasan industri dan perubahan ruang yang menyertainya membuat kondisi awal sumber air perlu diperiksa melalui kajian hidrologi, pengukuran debit, dan data kualitas air.

3. Sumber penghidupan

Sistem penghidupan masyarakat yang bertumpu pada perkebunan, pertanian, dan perikanan bergantung pada akses terhadap lahan, air, wilayah pesisir, dan jalan produksi. Apabila rencana pembangunan kawasan industri terus dilakukan pihak perusahaan, dan mempercepat alih fungsi ruang, maka perubahan tersebut dapat memicu dampak

kausalitas yang menjalar dari penurunan aktivitas produksi hingga meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi masyarakat.

Gambar 5.3 Potensi Rantai Dampak Perubahan Ruang terhadap Penghidupan
Sumber: Analisis penelitian berdasarkan hasil survei dan PAR.



Diagram di atas menggambarkan skenario rantai dampak kausalitas sebagai bentuk indikasi potensi risiko ke depan. Alur ini memperlihatkan bagaimana alih fungsi ruang akibat rencana kawasan industri dapat secara kasual membatasi akses masyarakat pada sumber daya vital yang kemudian berdampak pada penurunan produksi, merosotnya pendapatan rumah tangga dan berujung pada meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi masyarakat di Kecamatan Siniu.

5.4 Penundukan Wilayah Kelola Rakyat sebagai Ruang Hidup

Penundukan terhadap Wilayah Kelola Rakyat (WKR) sebagai ruang hidup tidak selalu berlangsung melalui pengambilalihan ruang secara langsung. Ia dapat bekerja secara bertahap ketika masyarakat kehilangan

kemampuan untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh terjadi di wilayah mereka. Dalam situasi pembangunan Kawasan PSN NEPIE di Kecamatan Siniu saat ini, situasi tersebut perlu dibaca melalui relasi antara negara, perusahaan, tokoh-tokoh berpengaruh di tingkat lokal, dan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada tanah, air, lahan pertanian, pesisir serta sumber daya alam lainnya.

Dari perspektif WALHI Sulawesi Tengah, persoalan mendasarnya terletak pada ketimpangan kuasa menentukan masa depan ruang. Negara mempunyai kewenangan administratif dan politik untuk menetapkan kebijakan pembangunan dan peruntukan serta pemanfaatan ruang. Perusahaan memiliki modal, informasi teknis serta akses terhadap proses investasi. Sementara itu, masyarakat memiliki pengetahuan dan hubungan langsung dengan wilayahnya, tetapi tidak memiliki kemampuan yang sama untuk mengintervensi kebijakan yang kemudian mengubah wilayahnya. Belum lagi masyarakat di Kecamatan Siniu juga tidak memiliki kemampuan bernegosiasi, menyampaikan keberatan ketika proses perusahaan masuk di tahun 2023 dan mulai melakukan aktivitas pembebasan lahan di Desa Siniu dan Desa Siniu Sayogindano.

Dalam relasi seperti ini, penguasaan informasi menjadi bagian penting dari penguasaan ruang. Masyarakat tidak mungkin mengambil keputusan secara bebas dan sadar apabila informasi mengenai kebutuhan lahan, batas kawasan, jenis dan skala industri, kebutuhan air dan energi, potensi pencemaran, perubahan akses, maupun risiko terhadap mata pencaharian tidak tersedia secara utuh dan mudah dipahami.

Penundukan juga dapat terjadi ketika partisipasi masyarakat direduksi menjadi penerimaan terhadap keputusan yang secara substantif telah ditentukan sebelumnya. Kehadiran masyarakat dalam pertemuan atau sosialisasi tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya partisipasi bermakna. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat mempunyai kesempatan memperoleh informasi sebelum keputusan

dibuat, mendiskusikannya secara mandiri, mengajukan keberatan, mempertanyakan risiko, serta mempengaruhi keputusan akhir tanpa tekanan.

Bagi WALHI Sulawesi Tengah, penundukan Wilayah Kelola Rakyat sebagai ruang hidup tidak semata-mata ditandai oleh hilangnya kepemilikan atas tanah, tetapi terutama ketika masyarakat kehilangan kuasa menentukan masa depan ruang hidupnya sendiri. Karena itu, pembangunan Kawasan PSN NEPIE di Kecamatan Siniu harus dikritisi sejauh mana prosesnya menjamin hak masyarakat atas informasi, partisipasi yang bermakna, serta kebebasan untuk menerima, menolak, atau mengajukan keberatan terhadap keputusan yang berpotensi merubah ruang hidup mereka. Ketika keputusan mengenai sumber penghidupan dan masa depan wilayah suatu komunitas lebih dominan ditentukan kepentingan negara dan investasi sementara masyarakat hanya sebatas menjadi penerima keputusan, maka pembangunan berpotensi menjadi instrumen penundukan ruang serta memperparah kerentanan ekologis.

5.5 Menguji Klaim Industri Hijau

Klaim NEPIE sebagai kawasan industri hijau perlu ditempatkan sebagai objek yang harus diuji secara kritis, bukan sebagai kesimpulan yang diterima sejak awal. Kehijauan suatu kawasan industri tidak dapat direduksi pada produk akhir berupa material penunjang kendaraan listrik ataupun penggunaan terminologi hilirisasi dan transisi energi. Ukuran yang lebih mendasar adalah bagaimana keseluruhan proses industri berinteraksi dengan ruang hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Karena itu, penelitian selanjutnya perlu menelusuri secara utuh sumber dan kebutuhan air industri, sumber energi yang digunakan, potensi pencemaran dan emisi, perubahan bentang alam, pengelolaan limbah,

hingga dampaknya terhadap sumber air, lahan produktif dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), kawasan pesisir, serta sumber-sumber penghidupan masyarakat. Perspektif ini penting untuk memastikan bahwa agenda industrialisasi yang membawa narasi ekonomi hijau tidak justru memindahkan beban ekologis dari rantai konsumsi kendaraan listrik ke wilayah produksi dan ruang hidup masyarakat di Sulawesi Tengah.

Bab VI
Kesimpulan

Penelitian di Kecamatan Siniu memperlihatkan bahwa Wilayah Kelola Rakyat merupakan satu kesatuan ruang hidup yang menghubungkan lahan perkebunan dan pertanian, pesisir dan laut, mata air, sungai, kawasan pegunungan, jalan produksi, serta permukiman. Ketergantungan ini bersifat langsung: ruang tersebut menopang produksi, pendapatan rumah tangga, ketersediaan air bersih, mobilitas menuju kebun, dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.

Basis penghidupan responden sangat kuat pada sektor perkebunan. Dari 83 responden petani, terdapat 80 pencatatan pengelolaan tanaman perkebunan dan 19 pencatatan hortikultura. Penguasaan lahan juga relatif kuat secara administratif, dengan 60 responden (72,3 persen) memiliki SHM, 18 responden (21,7 persen) menggunakan SKT, empat responden (4,8 persen) memiliki bukti kuitansi jual beli, dan satu responden (1,2 persen) berada pada kategori lahan garapan/lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa rencana perubahan fungsi ruang berpotensi bersentuhan langsung dengan aset produktif yang telah dikelola masyarakat.

Kerentanan WKR tidak berdiri sendiri. Masyarakat telah menghadapi banjir, angin kencang, dan kemarau panjang yang mempengaruhi produksi, pendapatan, air bersih, kesehatan, peternakan, dan aktivitas melaut. Matriks partisipatif menempatkan pertanian pada kerentanan tinggi terhadap ketiga bahaya tersebut, sementara perkebunan sangat rentan terhadap angin dan kekeringan. Dengan kondisi dasar seperti ini, tambahan tekanan terhadap tutupan lahan, sumber air, atau akses ruang berpotensi memperbesar kerentanan yang telah ada.

Dalam konteks rencana NEPIE seluas 2.500 hektar, pemetaan partisipatif mencatat kekhawatiran atas potensi berkurangnya lahan perkebunan, terganggunya sumber mata air, serta perubahan fungsi ruang hidup. Di sisi lain, dokumen penelitian mencatat Kecamatan Siniu memiliki LCP2B seluas 1.206,79 hektare. Temuan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menempatkan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat, sumber air, lahan pangan, dan keselamatan ekologis sebagai prasyarat dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa WKR di Kecamatan Siniu tidak dapat diperlakukan sebagai ruang kosong yang tersedia untuk di konversi. WKR adalah ruang hidup dan basis ekonomi rakyat. Setiap kebijakan atau proyek yang berpotensi mengubah bentang ruang perlu didahului keterbukaan informasi, penilaian dampak yang mempertimbangkan kondisi ekologis dan sosial yang telah ada, serta pelibatan bermakna masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok yang paling bergantung pada sumber daya alam.

Bab VII
Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi utama laporan ini adalah menempatkan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat (WKR), sumber air, lahan pangan, wilayah pesisir, kawasan pegunungan, dan keselamatan rakyat sebagai dasar pengambilan keputusan atas seluruh rencana pembangunan kawasan industri nikel di Kecamatan Siniu. Rekomendasi ini disusun untuk memastikan bahwa ruang hidup rakyat tidak dikorbankan oleh kuasa modal, kebijakan pembangunan yang ekstraktif, maupun proses pengambilan keputusan yang tidak partisipatif.

7.1 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu memastikan bahwa keputusan yang dapat mengubah fungsi ruang tidak diteruskan sebelum informasi dasar, batas kawasan, dokumen lingkungan, dan proses partisipasi masyarakat tersedia serta dapat diperiksa secara terbuka.

Langkah yang perlu dilakukan meliputi:

1. Membuka informasi mengenai batas dan tahapan pengembangan NEPIE, kebutuhan lahan, perizinan, infrastruktur pendukung, serta rencana penggunaan air dan energi;
2. Melakukan analisis tumpang-susun antara batas kawasan industri dengan lahan masyarakat, permukiman, sumber air, sungai, jalan produksi, wilayah pesisir, kawasan rawan banjir, dan LCP2B;
3. Mendokumentasikan serta melindungi mata air dan sumber air yang digunakan masyarakat sebelum perubahan pemanfaatan ruang berlangsung;

4. Memastikan masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan mudah dipahami sebelum konsultasi atau pengambilan keputusan dilaksanakan;
5. Menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, keberatan, dan usulan tanpa tekanan;
6. Memastikan proses administrasi pertanahan dan pengadaan lahan berlangsung secara transparan, terutama bagi masyarakat yang menggunakan SKT, kwitansi jual beli, atau mengelola lahan garapan; dan
7. Membangun mekanisme pengaduan yang aman, mudah diakses, dan memiliki prosedur penyelesaian yang jelas.

7.2 Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat dan Pengambil Kebijakan Sektor Industri

Pemerintah pusat perlu mengevaluasi kebijakan hilirisasi dan proyek industri nikel yang berpotensi memperluas tekanan terhadap ruang hidup rakyat. Status proyek strategis, narasi investasi, dan klaim industri hijau tidak boleh digunakan untuk menyingkirkan hak masyarakat atas tanah, air, pangan, dan lingkungan hidup. Kebijakan industri harus diuji melalui daya dukung dan daya tampung lingkungan, risiko sosial-ekologis, serta dampaknya terhadap kelompok yang paling rentan.

Setiap penetapan dan pelaksanaan proyek industri wajib memastikan keterbukaan informasi, akses dokumen lingkungan, konsultasi publik yang substantif, serta jaminan bahwa masyarakat dapat menyampaikan persetujuan atau penolakan tanpa tekanan. Negara tidak boleh menjadi alat legitimasi kuasa modal melalui kebijakan yang mempercepat perampasan ruang hidup rakyat.

7.3 Rekomendasi untuk Korporasi

PT Anugerah Teknik Industri (ATHI) selaku perusahaan pengembang kawasan NEPIE harus menghentikan praktik pembebasan lahan, pendekatan individual, dan produksi narasi manfaat ekonomi yang mengabaikan keseluruhan sistem penghidupan masyarakat. Setiap rencana kegiatan harus menghormati hak masyarakat atas informasi, hak untuk berorganisasi, hak untuk menolak, serta hak untuk mempertahankan Wilayah Kelola Rakyatnya.

Kompensasi atau janji kerja tidak boleh dijadikan alat untuk memecah posisi kolektif masyarakat. Penilaian dampak harus menghitung kehilangan fungsi ekologis, hilangnya sumber air, terganggunya produksi pangan, meningkatnya beban kerja perempuan, risiko banjir, dan hilangnya akses terhadap kebun, pesisir, serta ruang produksi lainnya. Tanpa pemenuhan prinsip tersebut, proyek industri berisiko menjadi bentuk perampasan ruang hidup melalui mekanisme pasar dan administrasi.

7.4 Rekomendasi untuk Masyarakat, Organisasi Rakyat, dan WALHI

Masyarakat bersama organisasi rakyat dan WALHI Sulawesi Tengah perlu memperkuat dokumentasi Wilayah Kelola Rakyat melalui pemetaan partisipatif yang lebih rinci, pendataan sumber air, kebun, pesisir, kawasan rawan banjir, jalur produksi, dan wilayah yang memiliki nilai sosial-ekologis penting. Dokumentasi ini perlu menjadi alat advokasi, alat pendidikan rakyat, sekaligus dasar untuk menolak klaim bahwa wilayah tersebut merupakan ruang kosong yang siap dialihfungsikan.

Penguatan organisasi rakyat perlu diarahkan untuk membangun posisi tawar kolektif, memperluas pendidikan hukum dan lingkungan, memastikan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam forum pengambilan keputusan, serta membangun mekanisme perlindungan bagi warga yang menyampaikan kritik. Advokasi harus menempatkan

keselamatan rakyat, kedaulatan pangan, pemulihan ekologis, dan keadilan antar generasi sebagai agenda utama.

7.5 Agenda Advokasi Lanjutan

Sebagai tindak lanjut, perlu disusun agenda advokasi yang mencakup: penyusunan peta WKR Kecamatan Siniu; audit sosial-ekologis terhadap rencana NEPIE; permintaan keterbukaan dokumen perizinan dan lingkungan; konsolidasi warga lintas desa; penyusunan kronologi pembebasan lahan dan perubahan ruang; serta penyusunan policy brief untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan jaringan masyarakat sipil. Agenda ini penting untuk memastikan hasil penelitian tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi alat perjuangan rakyat dalam mempertahankan ruang hidupnya.

Daftar Pustaka

Bebbington, A., Hinojosa, L., Bebbington, D. H., Burneo, M. L., & Warnaars, X. (2008). Contention and Ambiguity: Mining and the Possibilities of Development. *Development and Change, 39*(6), 887–914. https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2008.00517.x

Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Moutong. (26 September 2025). *Kecamatan Siniu Dalam Angka 2025.* Diakses pada 28 September 2026, dari https://parigimoutongkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/9f5b9487c371efd6a0a77f8c/kecamatan-siniu-dalam-angka-2025.html

Bridge, G. (2004). CONTESTED TERRAIN: Mining and the Environment. *Annual Review of Environment and Resources, 29*(1), 205–259. https://doi.org/10.1146/annurev.energy.28.011503.163434

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong. (n.d.). *Laporan pelaksanaan survei kesesuaian tata ruang atas rencana lokasi pembangunan kawasan industri PT Anugerah Tehnik Industri, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah* [Laporan survei].

Fasyah, A. K., & Hamid, I. (2024). Jalan Terjal Gerakan Lingkungan Hidup Dalam Wujud Antagonisme Paradigmatik. *Huma: Jurnal Sosiologi, 3*(3), 232–244. https://doi.org/10.20527/h-js.v3i3.243

Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977. In C. Gordon (Ed.), *Pantheon Books.*

Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. (2011). *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia.* University of Hawaii Press. https://books.google.co.id/books?id=MU2zKhuzMuwC

Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory Action Research*

Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place. Taylor \& Francis. https://books.google.co.id/books?id=daKkkt0NiPQC

Muhyiddin, M., Pardede, T., Nugroho, H., & Mendatu, A. (2026). The Industry–Settlement–Environment Nexus in a Nickel-Based Industrial Zone: DPSIR Analysis and Spatial Planning Policy Implications in Morowali Regency, Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 10*(2), 159–177. https://doi.org/10.36574/jpp.v10i2.860

Neo Energy. (n.d.). *NEPIE.* Retrieved September 29, 2026, from https://neoenergy.co.id/id/nepie

PT Anugrah Tehnik Industry. (2023, 19 Mei). *Pemberitahuan harga pembebasan lahan* (Surat No. 003.SPb/ATHI-Dos/V/2023) [Surat perusahaan].

PT Anugrah Tehnik Industry. (2026, Februari). *Neo Energy Parimo Industrial Estate: Project profile* [Dokumen internal perusahaan, tidak dipublikasikan].

Scott, J. C. (1985). Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. In Αγαη (12th, berilu ed., Vol. 8, Number 5). Yale University Press.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2022). *Community-based area management (WKR): Strengthening and enhancing the recognition of community-based area management in realizing and protecting the rights to a healthy, fair, and sustainable natural resources and environmental management in Indonesia.*

WALHI. (2020, April 5). Berkeadilan dan Berkelanjutan: Sebuah Catatan Wilayah Kelola Rakyat. [walhi.or.id]

Warburton, E. (2024). Nationalist enclaves: Industrialising the critical mineral boom in Indonesia. *The Extractive Industries and Society, 20*, 101564. https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101564

WALHI SULAWESI TENGAH

YAYASAN TIFA

WALHI Sulawesi Tengah
2026